



## BPK Dalam Potensi Defisit APBD Kalbar

**PONTIANAK-RK.** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Barat akan mempelajari persoalan defisit APBD Kalbar Tahun Anggaran 2018. Untuk mengetahui secara lebih

mendalam.

"Nanti kalau sudah berjalan akan saya pelajari kenapa defisit APBD-nya," kata Kepala BPK Kalbar, Joko Agus Setyono, belum lama ini.

[Baca Hal... 4](#)

## BPK Dalam Potensi Defisit APBD Kalbar

Saat ini dirinya belum bisa berkomentar banyak terkait potensi defisit yang masih jadi tanda tanya tersebut.

"Saya baru masuk ke sini, belum bisa ditanya masalah itu. Saya belum bisa berkomentar," kata mantan Kepala BPK Kepulauan Riau ini.

Namun dikatakan dia, berkaitan APBD pasti sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan pada semester sebelumnya. Sehingga BPK pasti sudah tahu silpnya berapa.

"Misalnya aja pembahasan untuk penggunaan untuk tahun ini, yang jelas defisit itu belanjanya lebih besar dari pada pendapatannya, gitu lho," pungkas Joko.

Sementara mantan Kepala BPK Kalbar, Ida Sundari menuturkan, secara keseluruhan APBD Kalbar tidak terjadi defisit. Karena anggarannya memang sudah sesuai dengan yang diusulkan. Namun diakuinya memang ada beberapa penghematan yang kemudian berdampak pada pengurangan anggaran berasal dari APBN.

"Memang ada beberapa penghematan, jadi ada yang pengurangan anggaran. Justru dari APBN itu sendiri dikurangi, jadi sebenarnya bukan defisit," ujarnya.

Pemotongan anggaran ini kata dia, tidak hanya terjadi di daerah.

Di tingkat pemerintah pusat juga demikian. Sehingga anggaran yang direncanakan pada akhirnya tidak sesuai harapan. Akibat dilakukan pemotongan anggaran.

"Anggaran yang direncanakan itu sudah diberikan, tetapi pada saat pelaksanaan di tengah jalan ada pemotongan anggaran itu. Tidak hanya di daerah sebenarnya, di pusat dipotong juga," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, potensi defisit APBD Kalbar ini muncul ke publik pasca-beredarnya Surat Gubernur Kalbar Nomor 903/2115/TAPD. Di surat tersebut menyebutkan, potensi defisit APBD 2018 Rp600 miliar lebih. Potensi defisit ini lantaran sejumlah target pendapatan dan belanja daerah tidak terealisasi atau kurang penganggaran.

Ida memastikan, sejauh ini pihaknya tidak ada temuan terkait persoalan defisit APBD Kalbar. Cuma ada beberapa kegiatan yang mungkin tidak dapat dilaksanakan. Karena ada pemotongan anggaran itu.

"Dianggaran memang tidak ada, karena memang kebijakan dari pemerintah. Temuan dari BPK juga tidak ada terkait dengan itu," tutup Ida.

**Laporan: Rizka Nanda**  
**Editor: Arman Hairadi**